

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak pihak yang

berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Brebes, 17 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Brebes



Dra. TETTY YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3 Landasan Hukum.....	8
1.4 Sistematika Penyajian.....	9
1.5 Struktur Organisasi.....	10
1.6 Sumber Daya DPMPTSP.....	14
1.7 Aspek Strategis DPMPTSP.....	28
1.8 Permasalahan.....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1 Rencana Strategis.....	31
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024.....	32
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.2 Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan Umum....	64
4.2 Permasalahan yang Berkaitan Capaian Kinerja.....	64
4.3 Langkah – langkah Perbaikan.....	65
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Brebes 2023.....	15
1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Brebes 2024	16
1.3	Sarana dan prasarana DPMPTSP Kab. Brebes	16
2.1	Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (2024-2027)	32
2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Brebes Tahun 2024	33
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	34
3.1	Skala Pengukuran Kinerja	37
3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024	38
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja (indikator hasil SKM) Tahun 2022 - 2024	39
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja (indikator realisasi investasi) Tahun 2022 – 2024	39
3.5	Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Tahun 2022 – 2024.....	40
3.6	Rincian Investasi Berdasarkan LKPM Tahun 2022 – 2024.....	41
3.7	Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah NIB yang Terbit Tahun 2022-2024	43
3.8	Rincian Investasi Berdasarkan NIB yang Terbit Tahun 2022-2024	44
3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD	45
3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	45
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Provinsi	45
3.12	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	46
3.13	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	47
3.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
3.15	Program/Kegiatan dan Anggaran Penunjang Keberhasilan Tahun 2024	49
3.16	Hasil Capaian Kinerja Tahun 2019-2024.....	52
3.17	Evaluasi dan Analisis Kinerja	55
3.18	Anggaran Belanja Tahun 2024	59
3.19	Realisasi Anggaran Tahun 2024	59
3.20	Efisiensi Biaya Tahun 2024	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar / Grafik	Halaman
1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Brebes.....	11
1.2 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Brebes berdasarkan Pendidikan.....	14
1.3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Brebes Berdasarkan Golongan.....	15
1.4 Ruang Pelayanan MPP Kab. Brebes	19
1.5 Loker Front Office MPP dan DPMPTSP Kab. Brebes	20
1.6 Loker Bank Jateng	21
1.7 Ruang Pojok Baca Digital MPP Kab. Brebes.....	21
1.8 Ruang Bermain Anak MPP Kab. Brebes	22
1.9 Ruang Laktasi	22
1.10 Loker Pengaduan, Kotak Saran, dan PPPK	23
1.11 Mesin Antrian	23
1.12 Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas.....	24
1.13 Mesin Anjungan Informasi.....	25
1.14 Terminal Charger.....	25
1.15 Toilet.....	26
1.16 Mushola.....	26
1.17 Tempat Parkir.....	27
3.1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024.....	38
3.2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Hasil SKM Tahun 2022-2024.....	39
3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Investasi Tahun 2022-2024.....	40
3.4 Grafik Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Tahun 2022 - 2024.....	41
3.5 Grafik Rincian Investasi Berdasarkan LKPM Tahun 2022-2024.....	42
3.6 Grafik Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah NIB yang Terbit Tahun 2022 – 2024.....	43
3.7 Grafik Rincian Investasi Berdasarkan Jumlah NIB yang Terbit Tahun 2022-2024..	44
3.8 Grafik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 – 2024.....	52
3.9 Grafik Realisasi Investasi Tahun 2020 – 2024.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud/bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja dapat dijadikan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan, dilakukan secara berkala.

Disamping itu penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes pada tahun mendatang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta rencana kinerja tahun 2024 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).

1.3 LANDASAN HUKUM

Pedoman yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kondisi Pegawai dan Sarana prasarana, serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Ikhtisar Perjanjian Kinerja berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Instansi, di samping itu juga diuraikan Rencana Kinerja Kegiatan sesuai dengan Program Tahun 2024 yang disertai Indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Uraian terbagi menjadi:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi kebijakan di perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. menyelenggarakan kebijakan di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- f. menyelenggarakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- g. menyelenggarakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan.
- h. menyelenggarakan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
- i. menyelenggarakan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan serta surat ketetapan biaya pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah atas dasar pelimpahan atau pendelegasian wewenang sesuai aturan yang berlaku;
- j. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian.
- k. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

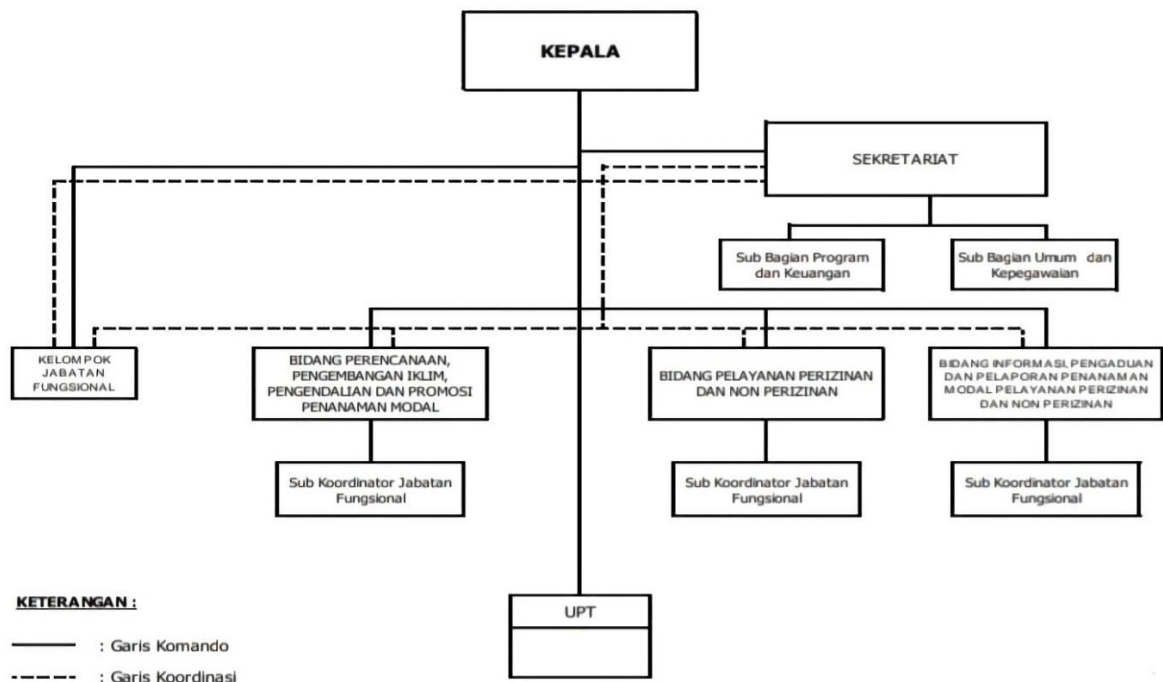
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal,
- d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
- e. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Brebes

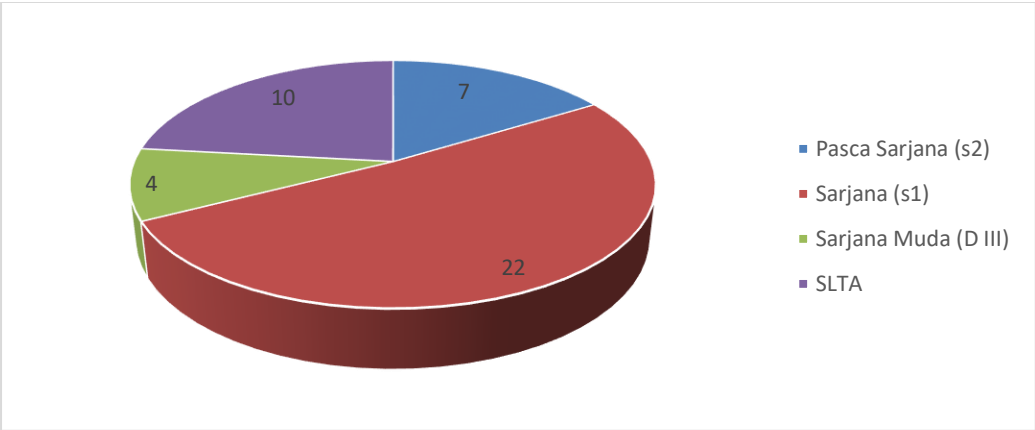


1.6 SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.6.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes adalah 43 orang yang terdiri dari PNS 16 orang, dan 27 orang non PNS Kabupaten Brebes, dengan klasifikasi berdasarkan pendidikan : Pasca Sarjana (S2) 7 orang, Sarjana S1 22 orang, Sarjana Muda (D3) 4 orang, SLTA 10 orang. Klasifikasi berdasarkan golongan : Gol (II) 2 orang, Gol (III) 8 orang dan Gol (IV) 6 orang.

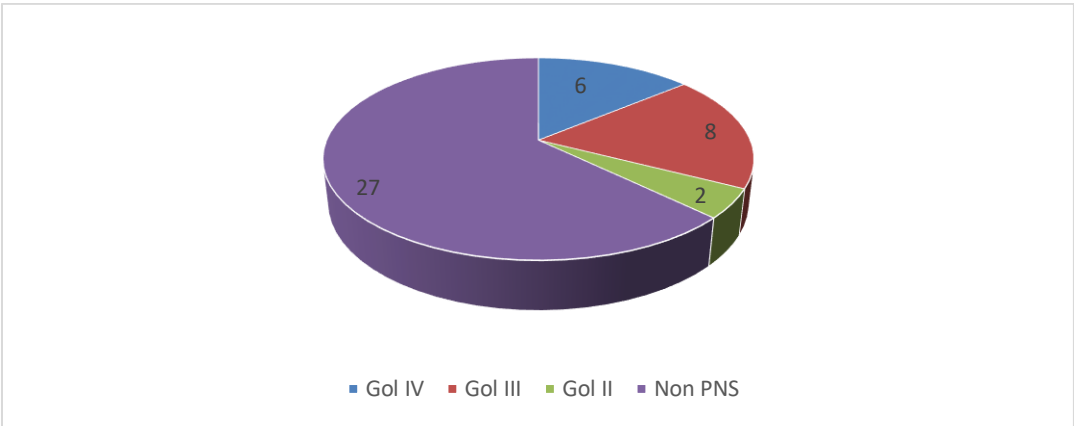
Gambar 1.2
Grafik Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Brebes Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
DPMPTSP Kabupaten Brebes Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	2	-	8	-	10
3	D3	0	0	3	1	4
4	S1	4	3	8	7	22
5	S2	5	2	-	-	7
	Jumlah	11	5	19	8	43

Gambar 1.3
Grafik Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Brebes Tahun 2024 berdasarkan Golongan



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
DPMPTSP Kabupaten Brebes Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Gol IV	5	1	6
2	Gol III	4	4	8
3	Gol II	2	0	2
4	Non PNS	19	8	27
	Jumlah	30	13	43

1.6.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bngunan Kantor Pemrintah	1	Paket
2	Stationary Generating Set	1	Unit
3	Station Wagon	5	Unit
4	Sepeda Motor	8	Unit
5	Global Positioning System	1	Unit
6	Meter X - 27 Dari Platina Tridium	2	Unit
7	Mesin Ketik Manual Portabel (11-13 Inci)	3	Unit
8	Mesin Ketik Elektronik / Selektrik	1	Unit
9	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
10	Lemari Besi / Metal	13	Unit
11	Lemari Kayu	37	Unit
12	Rak Besi	11	Unit
13	Rak Kayu	3	Unit
14	Filling Cabinet Besi	11	Unit
15	Brandkas	1	Unit
16	Locker	2	Unit
17	Lemari Kaca	5	Unit
18	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit
19	Papan Visual / Papan Nama	6	Unit
20	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
21	White board electronic	1	Unit
22	Mesin Laminating	1	Unit
23	Alat OPerekam Suara (Voice pen)	1	Unit
24	Papan nama Instansi	5	Unit
25	Papan Pengumuman	4	Unit
26	Alat Kantor Laainnya	5	Unit
27	Meja Kerja Kayu	65	Unit
28	Kursi Besi / Metal	212	Unit
29	Meja Rapat	3	Unit
30	Meja Podium	1	Unit
31	Meja Resepsionis	3	Unit
32	Meja Bundar	2	Unit
33	Meja 1 / 2 Biro	11	Unit
34	Kursi Rapat	50	Unit
35	Kursi Tamu	11	Unit
36	Kursi Putar	18	Unit
37	Bangku Tunggu	4	Unit
38	Meja Komputer	4	Unit
39	Sofa	18	Unit

40	Meubeleur lainnya	4	Unit
41	Lemari Es	1	Unit
41	A.C window	14	Unit
42	A.C split	47	Unit
43	Kipas Angin	6	Unit
44	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Unit
45	Tabung Gas	1	Unit
46	Rak Piring Alumunium	1	Unit
47	Televisi	10	Unit
48	Amplifier	3	Unit
49	Loudspeaker	6	Unit
50	Sound System	2	Unit
51	Wireless	4	Unit
52	Microphone	2	Unit
53	Microphone Floor Stand	1	Unit
54	Unit Power Supply	14	Unit
55	Camera Video	3	Unit
56	Tustel	1	Unit
57	Tangga Alumunium	1	Unit
58	Dispenser	10	Unit
59	Karpet	1	Unit
60	Gordyin/Cray	2	Unit
61	Tangki Air	1	Unit
62	Alat Rumah Tangga Lain Lain	3	Unit
63	Alat Pemadam / Portable	7	Unit
64	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
65	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
66	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13	Unit
68	Meja Rapat PEjabat Eselon III	1	Unit
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit
71	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	Unit
72	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
73	Buffet kayu	2	Unit
74	Audio Mixing Portable	1	Unit
75	Audio Amplifier	1	Unit
	Audio Catridge Recorder	1	Unit
76	Audio Amplifier	1	Unit
77	Audio Catdrige Recorder	1	Unit
78	Microphone/wireless MIC	1	Unit
79	Microphone Connector Box	1	Unit
80	Camera Electronic	1	Unit
81	Tripod Camera	1	Unit
82	Layar Film/Projector	1	Unit
83	Head Set	1	Unit
84	Lighting Head Body	2	Unit
85	Camera Conference	1	Unit
86	Telephone (PABX)	1	Unit
87	Pesawat Telephone	8	Unit
88	Telephone Mobile	1	Unit
89	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	Unit
90	Unit Tranceiver UHF Portable	1	Unit

91	Slide Projector	1	Unit
92	Termometer Digital	1	Unit
93	Mini Komputer	2	Unit
94	Internet	1	Unit
95	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit
96	P.C Unit	65	Unit
97	Laptop	21	Unit
98	Personal Komputer Lainnya	7	Unit
99	Hard Disk	6	Unit
100	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	10	Unit
101	Peralatan Mini Komputer Lainnya	1	Unit
102	CPU (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit
103	Monitor	9	Unit
104	Printer (Peralatan Personal Komputer)	65	Unit
105	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit
106	External	2	Unit
107	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3	Unit
108	Server	2	Unit
109	Router	1	Unit
110	Hub	1	Unit
111	Modem	2	Unit
112	Peralatan Jaringan Lainnya	3	Unit
113	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	Unit

1. Ruang Pelayanan:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di lantai satu Mall Pelayanan Publik (MPP), yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi



Gambar 1.4 Ruang Pelayanan MPP Kabupaten Brebes

2. Loker Front Office:

Di loket *Front Office*, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mal Pelayanan Publik.



Gambar 1.5 Loker *Front Office* MPP dan DPMPTSP Kab. Brebes

3. Bank Bank Jateng

Prasarana pendukung lainnya seperti Bank Jateng berada dalam satu gedung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Brebes bisa memperkuat konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai kegiatan investasi sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.



Gambar 1.6 Loket Bank Jateng

4. Perpustakaan/Pojok Baca

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes menyediakan perpustakaan mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk membaca berbagai macam buku yang sudah tersedia.



Gambar 1.7 Ruang Pojok Baca Digital MPP Brebes

5. Ruang Bermain Anak

Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar tidak merasa bosan.



Gambar 1.8 Ruang Bermain Anak

6. Ruang Laktasi

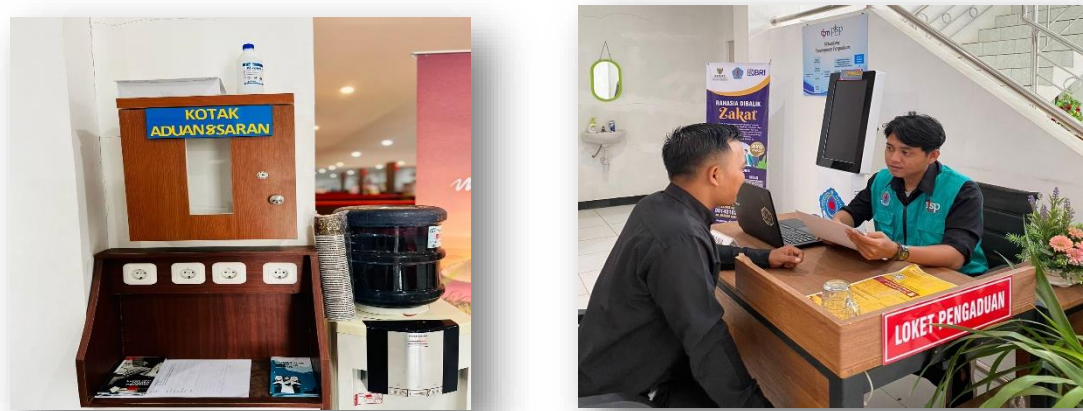
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya ataupun sekedar pumping.



Gambar 1.9 Ruang Laktasi

7. Loker dan Kotak Saran/Pengaduan

Loker dan kotak saran/pengaduan merupakan salah satu media atau fasilitas saran/pengaduan yang dapat di gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun saran/pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.



Gambar 1.10 Loker Pengaduan, Kotak Saran dan PPPK

8. Mesin Antrian

Mesin Antrian disediakan untuk memudahkan pemohon agar lebih tertib dalam melakukan pelayanan yang ada di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes



Gambar 1.11 Mesin Antrian

9. Aksesibilitas

Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang disabilitas, atau lansia yang menggunakan kursi roda, tongkat.



Gambar 1.12 Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas

10. Anjungan Informasi

Anjungan Informasi untuk membantu pemohon mengetahui layanan yang tersedia pada setiap booth.



Gambar 1. 13 Mesin Anjungan Informasi

11. Terminal Charger

Terminal charger disediakan dalam satu box yang berisi beberapa titik untuk para pemohon yang membutuhkan pengisian daya bila saat menunggu handphone mengalami kurang daya. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pemohon.



Gambar 1. 14 Terminal Charger

12. Kamar Mandi / WC

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes memiliki Kamar Mandi/ WC, yang di dalamnya juga disediakan fasilitas untuk penyandang *disabilitas*.



Gambar 1. 15 Toilet MPP dan DPMPTSPKab. Brebes

13. Mushola/Tempat Ibadah

Mushola/tempat ibadah merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.





Gambar 1.16 Mushola MPP dan DPMPTSP Kab. Brebes

14. Tempat Parkir

Lahan parkir yang luas disediakan untuk para pemohon baik roda empat maupun kendaraan roda dua.



Gambar 1.17 Tempat Parkir MPP dan DPMPTSP Kab. Brebes

1.7 ASPEK STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes secara umum memiliki Fungsi Strategis “Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal”.

Secara singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya dengan investasi penanaman modal yaitu :

1. Meningkatkan promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama penanaman modal.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan penanaman modal.
3. Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan capaian realisasi investasi

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPTSP

Tantangan yang dihadapi

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya tarik investasi di Daerah lain.
2. Lahan peruntukan industri yang terbatas dan mahal.
3. Disharmoni Regulasi PTSP dan Ego sektoral.

Kementrian Dalam Negeri dan BKPM RI mengeluarkan regulasi yang tumpang tindih sehingga membingungkan PTSP di Kabupaten. Kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi koordinasi, pembinaan hingga pengawasan PTSP di daerah, yang mana idealnya fungsi- fungsi tersebut cukup diampu oleh 1 Kementrian/ Lembaga.

Peluang yang dimiliki

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian di Kabupaten Brebes selain melihat pada kekuatan yang ada juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan

perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menjadi daya tarik calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Brebes.

Adapun peluang-peluang yang mampu dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes antara lain sebagai berikut :

1. Iklim investasi yang berkembang cukup baik di Kabupaten Brebes;
2. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Brebes,
3. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya.
4. Adanya pembinaan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
5. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

1.8 PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Adapun permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang penanaman modal Kabupaten Brebes sebagai berikut :

1. Belum efektifnya peran tim teknis dalam pelayanan perizinan;
2. Belum optimalnya penyediaan media informasi penanaman modal dan perizinan yang berbasis teknologi informasi yang bisa diakses oleh investor / pelaku usaha secara Dalam Jaringan (Daring);
3. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang syarat ketentuan terkait perizinan;
4. Masyarakat belum menggunakan website yang tersedia untuk

memperoleh informasi pelayanan perijinan terutama tentang aplikasi
ijin online;

5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan non perizinan;
6. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan non perizinan secara komprehensif;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2024 - 2027

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes telah menyusun Rencana Strategis Perubahan yang ingin dicapai selama kurun waktu 2024-2027. Rencana Strategi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

2.1.1 VISI DAN MISI JANGKA MENENGAH DAERAH

Visi pembangunan daerah berdasarkan RPJP Kabupaten Brebes 2005-2025 adalah **“Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera”**

Selanjutnya dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah. Misi merupakan rumusan umum mengenai cara atau upaya yang dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2024-2027, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu:

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif;
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana daerah;
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes mendukung pencapaian Misi-3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan Partisipatif; dan Misi-4: Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes mempunyai tujuan strategis yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (2024–2027)
DPMPTSP Kabupaten Brebes

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima	Pertumbuhan Laju Investasi	Meningkatnya Jumlah Investasi	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	2.604	2.666	2.736	2.812

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT 2024)

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penyusunan rencana kinerja, setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja dan angka target dari indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.2
 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Brebes Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80%
2	Meningkatnya Jumlah Investasi	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	2.666

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang penanaman modal, pada tahun 2024 telah melaksanakan 6 program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dalam mewujudkan pembangunan secara luas. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari upaya pencapaian Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan pencapaian 100 %.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan OPD sebagai penerima amanah melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, tranparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasai dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5. Sebagai dasar dalam kelengkapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes pada Tahun 2024 telah melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dengan Bupati Brebes untuk mewujudkan target kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah disepakati maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes menyusun perjanjian secara berjenjang mulai eselon II, eselon III dan eselon IV. Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes melaksanakan 6 program dengan 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80 %
2	Meningkatnya Jumlah Investasi	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	2.666

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	6.181.604.514	100% APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	100% APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	79.000.000	100% APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	91.800.000	100% APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	344.300.000	100% DAK Non Fisik
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	58.200.000	100% APBD
	TOTAL	6.754.904.514	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes adalah perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan. Selain itu akan disajikan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan anggaran kegiatan tahun 2023 dengan realisasi keuangannya.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvemenfl*). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan program.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % - 100 %	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	55 %	Kurang

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes disajikan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis.

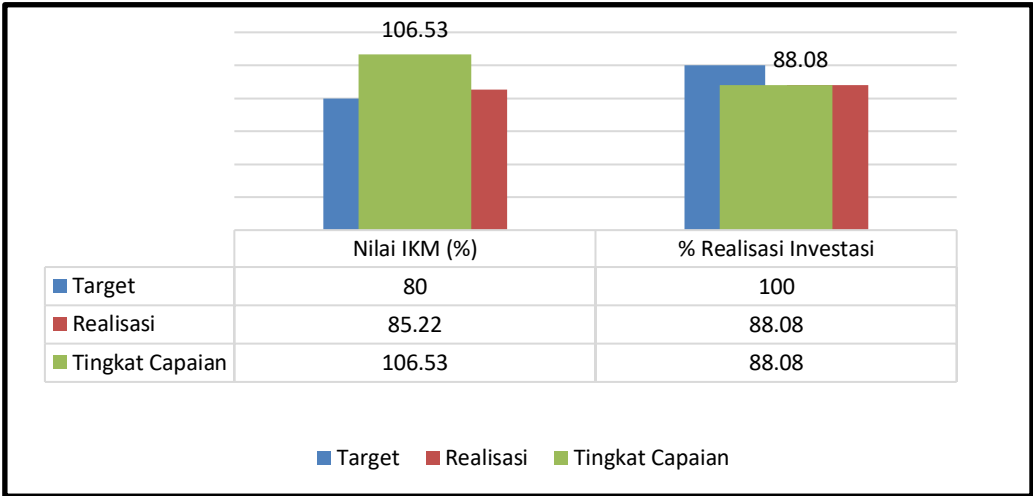
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80 %	85,22%	106,53%	Sangat Baik
Meningkatnya Jumlah Investasi	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	2.666	2.348	88,08%	Baik

Secara grafik target dan kinerja DPMPTSP dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024



Data pada table diatas capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat baik sebesar 106,53 % dan capaian Realisasi Investasi baik sebesar 88,08%.

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui metode wawancara dan pengisian kuisisioner di Mal Pelayanan Publik dengan jumlah responden sebanyak 302 (tiga ratus dua) responden. Pemilihan responden dilakukakn secara simple random sampling dari semua pengguna layanan. Kuisisioner yang terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif. Hasil survey disusun dalam bentuk laporan yang akan

menjadi dokumen penting sebagai dasar peningkatan pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

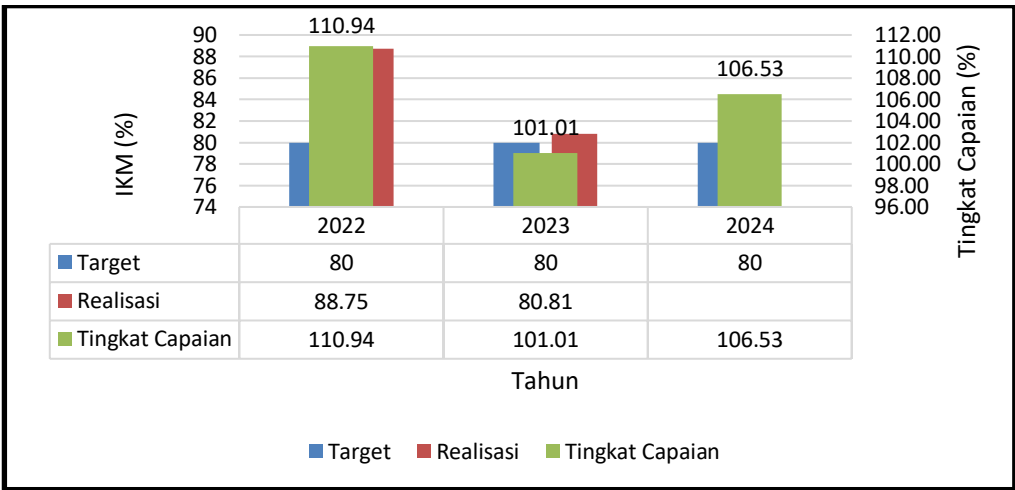
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Pada Indikator Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,81%	88,75%	80%	80,81%	80%	85,22%

Secara Grafik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022,2023, dan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Garfik Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2022, 2023 dan 2024



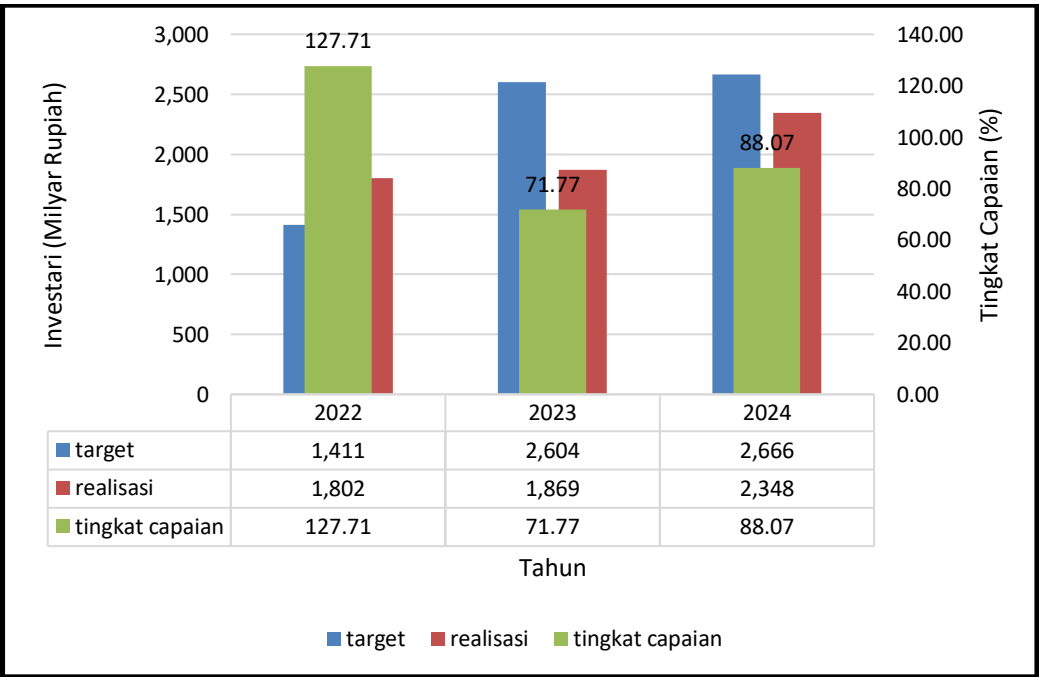
Dari grafik terlihat bahwa Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun 2022 sampai tahun 2024 selalu melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Pada indikator Realisasi Investasi
Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	1.411	1.802	2.604	1.869	2.666	2.348

Secara Grafik Realisasi investasi berdasarkan LKPM Tahun 2022,2023, dan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja
Pada indikator Realisasi Investasi
Tahun 2022, 2023 dan 2024



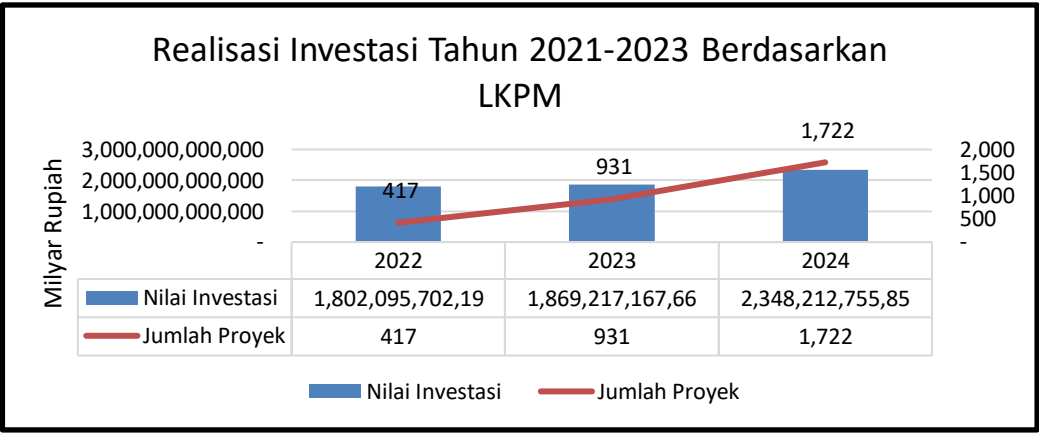
Target Investasi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 selalu naik, dengan nilai berturut-turut Rp. 1.411 milyar rupiah, Rp. 2.604 milyar rupiah dan Rp. 2.666 milyar rupiah. Begitu juga Realisasi investasi berdasarkan LKPM dari tahun 2022 sampai tahun 2024 selalu mengalami kenaikan dengan nilai berturut-turut Rp. 1.802 milyar rupiah, Rp. 1.869 milyar rupiah dan Rp. 2.348 milyar rupiah..

Tabel 3.5
Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM
Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	TAHUN	REALISASI INVESTASI	JUMLAH PROYEK
1	2022	1.802.095.702.198	417
2	2023	1.869.217.167.665	931
3	2024	2.348.212.755.858	1.722

Berdasarkan tabel dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut

Gambar 3.4
Grafik Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM
Tahun 2022, 2023 dan 2024



Dari grafik terlihat bahwa realisasi investasi mengalami kenaikan dari tahun 2022, 2023, 2024 dengan nilai Rp. 1.802 milyar, Rp. 1.869 milyar, Rp. 2.137 milyar. Begitu juga jumlah proyek yang dilaporkan mengalami kenaikan dari 417 proyek, 931 proyek dan 1.722 Proyek.

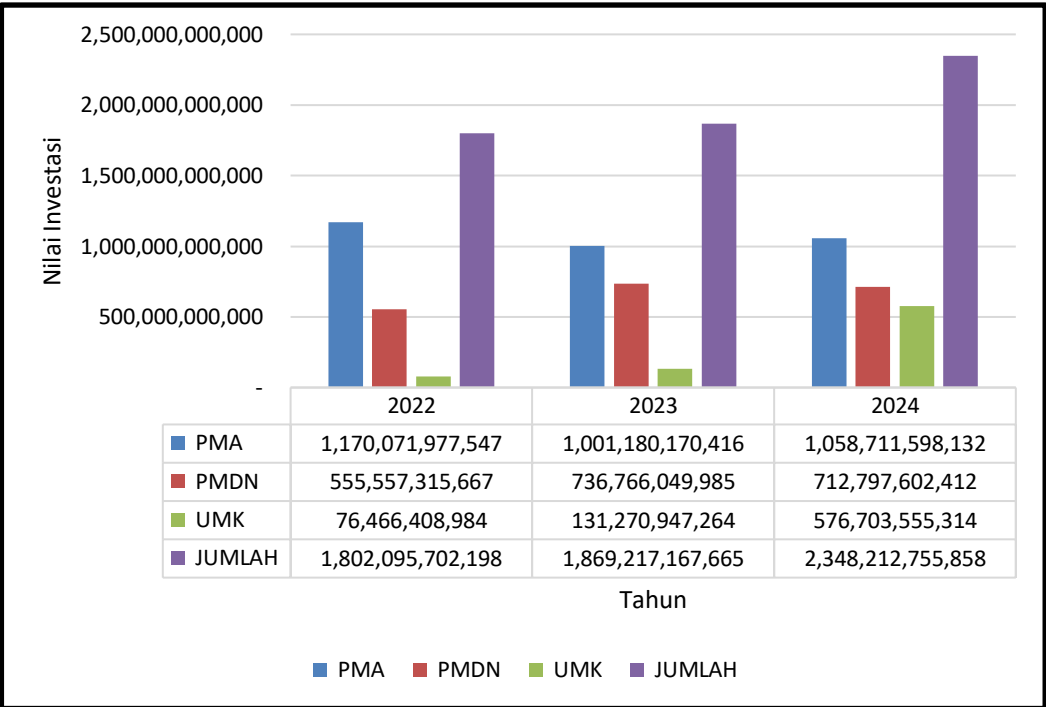
Adapun rincian Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rincian Investasi Berdasarkan LKPM
Tahun 2022,2023,2024

N O	TAHUN	PMA	PMDN	UMK	JUMLAH
1	2022	1.170.071.977.547	555.557.315.666	76.466.408.984	1.802.095.702.198
2	2023	1.001.180.170.416	736.766.049.985	131.270.947.264	1.869.217.167.665
3	2024	1.058.711.598.132	712.797.602.412	576.703.555.314	2.348.212.755.858

Berdasarkan tabel dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.5
Grafik Rincian Investasi Berdasarkan LKPM
Tahun 2022,2023,2024



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa investasi PMA mengalami kenaikan dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Sedangkan nilai PMDN tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan nilai PMDN tahun 2023. Nilai UMK 2024 juga mengalami kenaikan dibandingkan nilai PMDN tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan nilai investasi.

Analisa:

- Realisasi investasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 479 milyar rupiah karena ada kenaikan investasi pada PMA sebesar kurang lebih 57 milyar rupiah dan ada kenaikan investasi pada UMK sebesar kurang lebih 322 milyar rupiah
- Capaian kinerja tidak mencapai 100% atau tidak mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini terjadi karena :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengurus legalisasi perizinan
2. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui syarat ketentuan

terkait perizinan.

- 3. Pelaku usaha banyak yang belum memahami akan jaringan internet, jadi informasi yang ada di website belum bisa diupdate oleh para pelaku usaha.
- 4. Rendahnya kesadaran pelaku usaha melaporkan kemajuan Penanaman Modalnya secara online (LKPM) per periode.

Sebagai catatan, selain nilai investasi di atas, DPMPTSP mempunyai data investasi berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit, namun tidak digunakan sebagai data realisasi investasi karena Nomor Induk Berusaha (NIB) dibuat pada awal mulai usaha sehingga tidak menggambarkan kegiatan investasi di dalamnya.

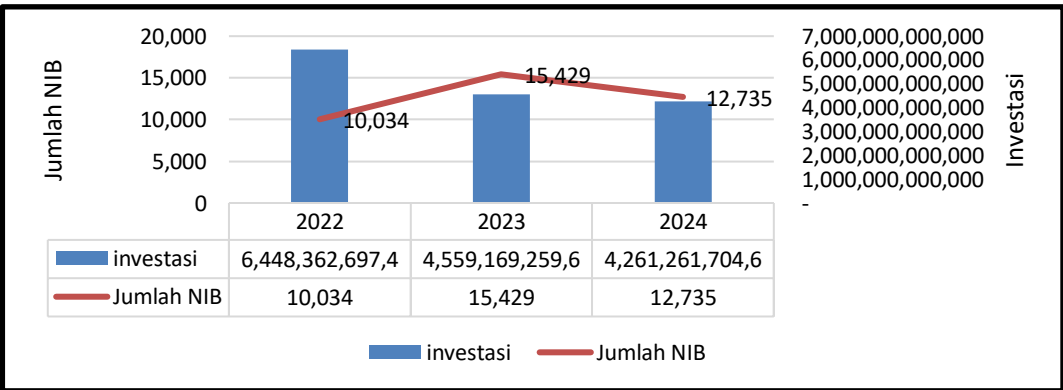
Berikut data Nomor Induk Berusaha (NIB) selama januari- Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah NIB yang terbit
Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	TAHUN	JUMLAH NIB	NILAI INVESTASI
1	2022	10.034	6.448.362.697.467
2	2023	15.429	4.559.169.259.662
3	2024	12.735	4.261.261.704.648

Berdasarkan tabel dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Gambar 3.6
Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah NIB yang terbit
Tahun 2022, 2023 dan 2024



Dari grafik terlihat bahwa nilai investasi berdasarkan NIB yang terbit mengalami penurunan dari tahun 2022 2023, dan 2024 dengan nilai Rp. 6.448 milyar, Rp. 4.559 milyar, Rp. 4.261 milyar.

Sedangkan jumlah NIB yang terbit mengalami kenaikan dari tahun 2022,2023 dan mengalami penurunan pada 2024 dengan jumlah berturut-turut 10.034, 15.429, dan 12.735

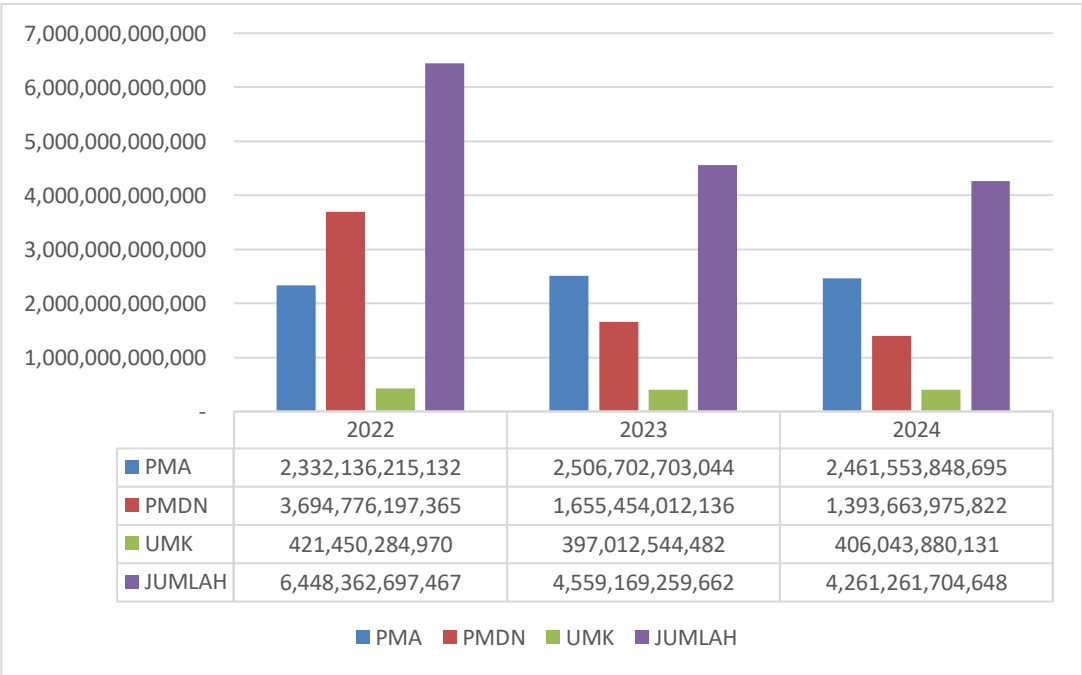
Adapun rincian Realisasi Investasi Berdasarkan NIB yang terbit adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rincian Investasi Berdasarkan NIB yang terbit
Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	TAHUN	PMA	PMDN	UMK	JUMLAH
1	2022	2.332.136.215.132	3.694.776.197.365	421.450.284.970	6.448.362.697.467
2	2023	2.506.702.703.044	1.655.454.012.136	397.012.544.482	4.559.169.259.662
3	2024	2.461.553.848.695	1.393.663.975.822	406.043.880.131	4.261.261.704.648

Berdasarkan tabel dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut

Gambar 3.7
Grafik Rincian Investasi Berdasarkan NIB yang terbit
Tahun 2022, 2023 dan 2024



Dari grafik terlihat bahwa realisasi investasi PMA berdasarkan NIB yang terbit mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai 2024 dengan nilai berturut-turut Rp. 2.332.136.215.132, Rp 2.506.702.703.044 dan Rp 2.461.553.848.695 .

Untuk investasi PMDN berdasarkan NIB yang terbit tahun 2022 senilai Rp 3.694.776.197.365,- dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan nilai investasi Rp 1.655.454.012.136,- tetapi mengalami penurunan lagi pada tahun 2024 dengan nilai investasi Rp 1.393.663.975.822.

Untuk investasi UMK berdasarkan NIB yang terbit tahun 2022 senilai Rp.421.450.284.970,- dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan nilai investasi Rp.397.012.544.482,- tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan nilai investasi Rp. 406.043.880.131.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RPD 2023-2026

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RPD 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80%	85,22%	106,53%
	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	2.812	2.348	83,50%

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 sebesar 85,22% dengan tingkat capaian 106,53% sedangkan Realisasi Investasi sebesar 2.348 Milyar Rupiah dengan tingkat capaian 83,50% dari target akhir RPD.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten	Realisasi Nasional	%
1	Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	2.348	1.714.200	0,17

Sumber : <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten	Realisasi Jawa Tengah	%
1	Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	2.348	68.669	3,42%

Sumber : <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>

Berdasarkan tabel 3.10 terlihat bahwa capaian realisasi investasi kabupaten Brebes sebesar Rp. 2,348 Triliun dibandingkan realisasi Investasi Nasional pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.714,2 Triliun atau sebesar 0,17 %. Sedangkan tabel 3.11 capaian realisasi investasi kabupaten Brebes sebesar Rp. 2,348 Triliun dibandingkan realisasi Investasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 68,669 Triliun atau sebesar 3,42 %.

3.1.5 Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.12
Analisa penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Analisa Penyebab	Solusi Perbaikan / Peningkatan
1	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,81%	80 %	85,22%	• Persepsi masyarakat terkait persyaratan pelayanan publik naik • Persepsi masyarakat terkait kemudahan prosedur pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya • Persepsi masyarakat terkait waktu penyelesaian pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya. • Persepsi masyarakat terkait tarif/ biaya pelayanan naik dibandingkan	✓ Sosialisasi pelayanan ✓ Peningkatan kapasitas SDM pelayanan ✓ Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan secara rutin/ berkala ✓ Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan ✓ Pelayanan Sebagian sudah berbasis elektronik

					tahun sebelumnya. • Persepsi masyarakat terkait kesesuaian prosedur pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya. • Persepsi masyarakat terkait kompetensi petugas pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya. • Persepsi masyarakat terkait perilaku petugas pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya. • Persepsi masyarakat terkait penanganan pengaduan naik dibandingkan tahun sebelumnya. • Persepsi masyarakat terkait sarana dan prasana yang tersedia naik dibandingkan tahun sebelumnya.	
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 3.12 terlihat bahwa capaian Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 sebesar 85,22% melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%, walaupun mengalami penurunan dibandingkan dengan capain tahun 2023.

Tabel 3.13

Analisa penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Analisa Penyebab	Solusi Perbaikan / Peningkatan
2	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	1.869	2.666	2.348	•Belum efektifnya peran tim teknis perijinan •Belum optimalnya penyediaan media informasi berbasis teknologi informasi •Kurangnnya kesadaran masyarakat/pe laku usaha untuk mengurus legalisasi perizinan •Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui syarat ketentuan terkait perizinan •Pelaku usaha banyak yang belum memahami akan jaringan internet, jadi informasi yang ada di website belum bisa diupdate oleh para pelaku usaha. •Rendahnya kesadaranan pelaku usaha melaporkan kemajuan Penanaman Modalnya secara online (LKPM) per periode •	✓ Akan dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan secara berkala kepada pelaku usaha ✓ Sosilaisasi dan Bintek LKPM kepada Pelaku Usaha

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes untuk mendukung sasaran strategis tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran/ Indikator/ Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	% keu	% kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah				
<i>Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i>	6.186.920.514	5.299.185.834	85,65	106,53
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.026.920.514	5.464.808.166		
Program Pelayanan Penanaman Modal	110.000.000	109.891.732		
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000	49.841.300		
Meningkatnya Jumlah Investasi				
<i>Realisasi Investasi (Milyar Rp)</i>	648.883.000	644.187.538	99,28	80,16
Program Promosi Penanaman Modal	0	0		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	648.883.000	644.187.538		
	6.835.803.514	5.943.373.372	86,94	93,34

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan jumlah anggaran Rp. 6.189.920.514,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.299.185.834,- atau sebesar 85,65%. Sedangkan realisasi kinerja atas Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai 85,22% dari target 80% atau mencapai 106,53%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator yang ditetapkan terdapat efisiensi sebesar 19,60%.

Sasaran Strategis Meningkatkan Jumlah Ivestasi dengan indikator Realisasi Investasi didukung oleh Program Pengendalian Penanaman Modal dengan jumlah anggaran Rp.648.883.000,- dengan realisasi anggaran Rp.644.187.538,- atau sebesar 99,28%. Sedangkan realisasi kinerja atas Realisasi Investasi sebesar Rp.2.348 Milyar dari target Rp. 2.666 Milyar atau 88,08%. Ini menunjukkan bahwa belum adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk

mencapai indikator yang ditetapkan .

3.1.7 Program / Kegiatan dan Anggaran Penunjang Keberhasilan Tahun 2024

Tabel 3.15
Program / Kegiatan dan Anggaran
Penunjang Keberhasilan Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.835.803.514
Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.186.920.514
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.026.920.514
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.624.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.392.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.322.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.525.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.385.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.676.418.700
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.526.988.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.120.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.072.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.660.700
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.528.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.920.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.920.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	818.378.846
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.140.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.198.741
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.398.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.450.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.565.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552.626.805
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	950.692.040
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.406.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.099.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.186.640
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.886.128
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.986.128
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.300.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	110.000.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	110.000.000

Kabupaten/ Kota	
<i>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	95.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000
<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	50.000.000
<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	50.000.000
Realisasi Investasi (Milyar Rp)	648.883.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	648.883.000
<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	648.883.000
<i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	76.768.000
<i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	440.646.500
<i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	131.468.500

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes didukung oleh 5 progam. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 3 program 8 kegiatan, sedangkan sasaran strategis meningkatnya jumlah investasi didukung oleh 2 program dan 2 kegiatan.

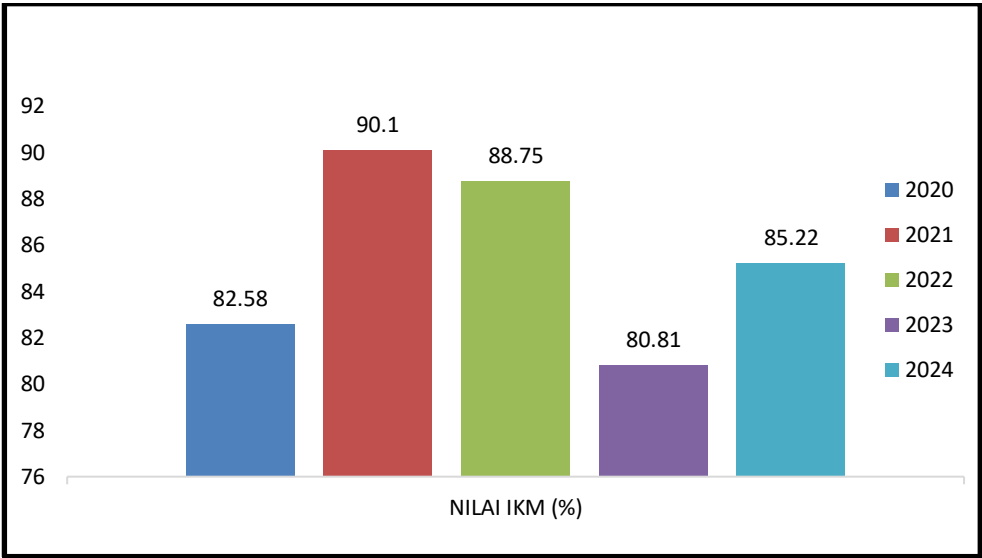
Tabel 3.16
Hasil Capaian Kinerja
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,58	90,1	88,75	80,81	85,22
2	Realisasi Investasi (Milyar Rp) Berdasarkan LKPM	1.256	1.309	1.802	1.869	2.348

Tahun 2024 pencapaian Hasil Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 80,81% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 80% atau sebesar 100,01 %. Sedangkan di tahun 2022 capaian sebesar 90,1% dari target 80% atau 112,63 %.

Untuk capaian nilai realisasi investasi tahun 2023sebesar Rp 1.869 M dari target yang direncanakan sebesar Rp. 2.604 M atau sebesar 71,77%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian sebesar Rp 1.802 M dari target yang direncanakan sebesar Rp. 1.411 M atau sebesar 127,72 %.

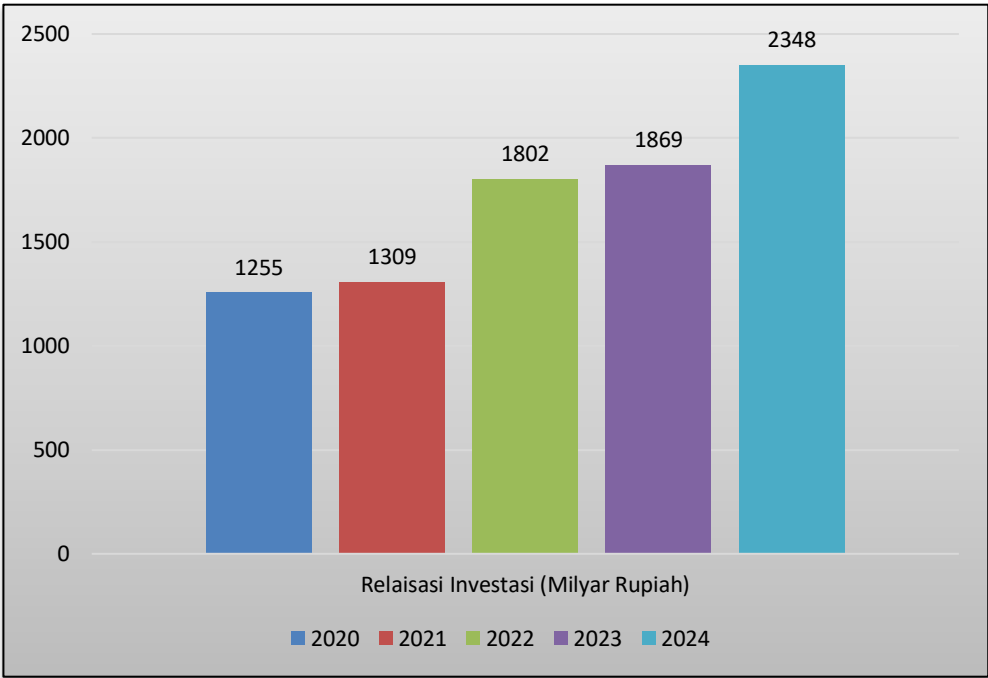
Gambar 3.8
Grafik Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024



Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 85,22% atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 80% dengan tingkat capaian 106,53% dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari Laporan Hasil SKM kenaikan nilai SKM karena:

- Persepsi masyarakat terkait persyaratan pelayanan publik naik
- Persepsi masyarakat terkait kemudahan prosedur pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya
- Persepsi masyarakat terkait waktu penyelesaian pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persepsi masyarakat terkait tarif/ biaya pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persepsi masyarakat terkait kesesuaian prosedur pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persepsi masyarakat terkait kompetensi petugas pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persepsi masyarakat terkait perilaku petugas pelayanan naik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persepsi masyarakat terkait penanganan pengaduan naik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persepsi masyarakat terkait sarana dan prasana yang tersedia naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.9
Grafik Realisasi Investasi
Tahun 2020 – 2024



Dari grafik terlihat bahwa Realisasi Investasi berdasarkan L K P M menunjukkan trend positif atau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terlihat juga bahwa meskipun realisasi investasi berdasarkan LKPM tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2023, akan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan :

- Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengurus legalisasi perizinan
- Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui syarat ketentuan terkait perizinan
- Pelaku usaha banyak yang belum memahami akan jaringan internet, jadi informasi yang ada di website belum bisa diupdate oleh para pelaku usaha.
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha melaporkan kemajuan Penanaman Modalnya secara online (LKPM) per periode.

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tabel 3.17
Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2024			% Capaian Tahun Sebelumnya (2023)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2023– 2026)
			Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah							
Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			80%	85,22%	106,53%	101,01%	106,53%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD DPMPPTSP (%)	80%	85,22%	106,53%	101,01%	106,53%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio implemtasi pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN	100%	100%	100,00%	100,00%	100%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum SKPD	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Pelaku Usaha)	5.050	12.735	308,58%	252,18%	247,28%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.050	12.735	252,18%	308,58%	247,28%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Ada/Tidak)(Ada = 1 / Tidak = 0)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya Jumlah Investasi							
Realisasi Investasi (Milyar Rp)			2.666	2.348	88,08	71,77	75,99%
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan usaha Menengah Kecil(Pelaku Usaha)	2	0	0%	150%	0%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Investasi	1	0	0%	0%	0%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Usaha dan pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi(Pelaku Usaha)	60	110	183,33%	100%	157,14%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Berita Acara Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	60	110	183,33%	100%	157,14%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah tercapai dengan tingkat capaian 106,53%. Begitu dengan program pendukung juga memenuhi target yang ditetapkan yaitu (1)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian 106,53%, (2) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan tingkat capaian 252,18%, (2) Program Pengelolaan Data dan Informasi Modal dengan tingkat capaian 100%,

Sedangkan tingkat capaian sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Investasi sebesar 80,16%. Adapun capaian program pendukung memenuhi target yang ditetapkan yaitu (1) Program Program promosi Penanaman Modal dengan tingkat capaian 0%, (2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tingkat capaian 157,14%.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Investasi yang maksimal pada tahun mendatang perlu ada peningkatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi:

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
3. Pengawasan Penanaman Modal

3.2 REALISASI ANGGARAN

Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun 2024.

Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes pada Tahun 2024 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp.6.835.803.514,-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp.5.943.373.372,-**

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	6.746.303.514	5.854.613.572	86,78
2	Belanja Modal	89.500.000	88.759.800	99,17
Jumlah		6.835.803.514	5.943.373.372	86,94

Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2024 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 5.854.613.572,- prosentase 86,78 % dari anggaran Rp. 6.746.303.514,-, sedangkan belanja modal sebesar Rp. 88.759.800,- prosentase 96,99% dari anggaran Rp. 89.500.000,-

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	
			%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.835.803.514	5.943.373.372	86,94
Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.186.920.514	5.299.185.834	85,65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.026.920.514	5.139.452.802	85,27
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.624.800	104.215.200	99,61
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.392.000	58.359.500	99,94
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.322.000	5.194.000	97,59
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.525.000	15.504.000	99,86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.385.800	25.157.700	99,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.676.418.700	2.831.068.775	77,01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.526.988.000	2.682.335.275	76,05
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.120.000	76.120.000	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.050.000	19.923.000	99,37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.072.000	16.903.000	99,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.660.700	26.419.500	99,10
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.528.000	9.368.000	98,32
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.920.000	66.920.000	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.920.000	66.920.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	818.378.846	817.298.735	99,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.140.300	10.072.603	99,33
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.198.741	109.462.600	99,33
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.398.000	68.211.880	99,73

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.450.000	54.429.350	99,96
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.565.000	22.539.300	99,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552.626.805	552.583.002	99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	950.692.040	910.874.472	95,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.406.400	28.301.500	96,24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.099.000	313.832.187	98,04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.186.640	568.740.785	94,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.886.128	409.075.620	99,80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.986.128	152.684.320	99,80
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.600.000	208.097.800	99,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.300.000	48.293.500	99,99
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	110.000.000	109.891.732	99,90
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	110.000.000	109.891.732	99,90
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	95.000.000	94.892.232	99,89
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000	49.841.300	99,68
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.841.300	99,68
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	49.841.300	99,68
Realisasi Investasi (Milyar Rp)	648.883.000	644.187.538	99,28
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	648.883.000	644.187.538	99,28
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	648.883.000	644.187.538	99,28
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	76.768.000	74.782.000	97,41
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	440.646.500	440.189.200	99,90
Pengawasan Penanaman Modal	131.468.500	129.216.338	98,29

Tahun 2024 ada 1 sub Kegiatan yang penyerapan anggaran dibawah 90%, adalah :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (76,05%) tersisa pada komponen gaji, TPP dan insentif pemungutan retribusi.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2024, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Tertpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes didukung program dan anggaran sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20
Efisiensi Biaya Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	
			%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.835.803.514	5.943.373.372	86,94
Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal	6.186.920.514	5.299.185.834	85,65

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.026.920.514	5.139.452.802	85,27
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.624.800	104.215.200	99,61
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.392.000	58.359.500	99,94
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.322.000	5.194.000	97,59
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.525.000	15.504.000	99,86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.385.800	25.157.700	99,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.676.418.700	2.831.068.775	77,01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.526.988.000	2.682.335.275	76,05
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.120.000	76.120.000	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.050.000	19.923.000	99,37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.072.000	16.903.000	99,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.660.700	26.419.500	99,10
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.528.000	9.368.000	98,32
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.920.000	66.920.000	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.920.000	66.920.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	818.378.846	817.298.735	99,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.140.300	10.072.603	99,33
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.198.741	109.462.600	99,33
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.398.000	68.211.880	99,73
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.450.000	54.429.350	99,96
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.565.000	22.539.300	99,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552.626.805	552.583.002	99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	950.692.040	910.874.472	95,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.406.400	28.301.500	96,24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.099.000	313.832.187	98,04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.186.640	568.740.785	94,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.886.128	409.075.620	99,80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.986.128	152.684.320	99,80
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.600.000	208.097.800	99,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.300.000	48.293.500	99,99
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	110.000.000	109.891.732	99,90
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	110.000.000	109.891.732	99,90
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	95.000.000	94.892.232	99,89
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000	49.841.300	99,68
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.841.300	99,68
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	49.841.300	99,68
Realisasi Investasi (Milyar Rp)	648.883.000	644.187.538	99,28
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	648.883.000	644.187.538	99,28
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	648.883.000	644.187.538	99,28
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	76.768.000	74.782.000	97,41
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	440.646.500	440.189.200	99,90
Pengawasan Penanaman Modal	131.468.500	129.216.338	98,29

Dari tabel terlihat bahwa anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.186.920.514 dengan realisasi anggaran Rp. 5.299.185.834,- atau sebesar 85,65%. Sedangkan anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah investasi sebesar Rp.648.883.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 644.187.538,- atau sebesar 99,28%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes sebagai OPD sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sumber Dana dan Sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian sebagaimana bab sebelumnya dan berdasarkan penilaian sendiri (*self Assesment*) atas realisasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, capaian sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah** mencapai 106,53%, dengan capaian sasaran strategis **Meningkatnya Jumlah Investasi** tercapai 88,08%.

Dalam usahanya mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu didukung anggaran sebesar Rp. 6.835.803.514,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 5.943.373.372,- atau 86,94%.

4.2 PERMASALAHAN YANG BERKAITAN CAPAIAN KINERJA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dalam rangka pencapaian kinerja adalah :

1. Belum efektifnya satgas percepatan investasi.
2. Belum optimalnya penyediaan media informasi penanaman modal dan perizinan yang berbasis teknologi informasi yang bisa diakses oleh investor/ pelaku usaha secara Dalam Jaringan (Daring);
3. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang syarat ketentuan terkait perizinan;

4. Masyarakat belum menggunakan website yang tersedia untuk memperoleh informasi pelayanan perijinan terutama tentang aplikasi ijin online;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan non perizinan;
6. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan non perizinan secara komprehensif;

4.3 LANGKAH – LANGKAH PERBAIKAN

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka langkah- langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes guna mencapai tujuan dan sasaran di masa mendatang adalah :

1. Peningkatan Koordinasi dengan OPD terkait / Tim Teknis terkait pelayanan perizinan;
2. Melakukan sosialisasi/bintek kepada masyarakat/pelaku usaha tentang perijinan online dan laporan LKPM;
3. Peningkatan penyediaan media informasi penanaman modal dan perizinan yang berbasis teknologi informasi yang bisa diakses oleh investor / pelaku usaha secara Dalam Jaringan (Daring);
4. Mengadakan pendampingan pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha ke gerai semua kecamatan di Kabupaten Brebes;
5. Meningkatkan kualitas SDM terkait pelayanan perizinan dengan mengirimkan diklat perizinan ke BKPM;
6. Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan /kinerja yang akan datang.

Brebes, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes



Dra. ~~PETI~~ YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes telah disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Visi pembangunan daerah berdasarkan RPJP Kabupaten Brebes 2005-2025 adalah **“Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera”**

Selanjutnya dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah. Misi merupakan rumusan umum mengenai cara atau upaya yang dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu:

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif;
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana daerah;
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes mendukung pencapaian Misi-3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan Partisipatif; dan Misi-4: Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal.

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80%
	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima	Pertumbuhan Laju Investasi	Meningkatnya Jumlah Investasi	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	2.666

Untuk mendukung terwujudnya sasaran diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2024 menetapkan 5 (lima) program yang dijalankan melalui 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp . 6.835.803.514,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Capaian Anggaran
Tahun 2024

	Sasaran/ Indikator/ Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			
	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.186.920.514	5.299.185.834	85,65
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.026.920.514	5.139.452.802	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	110.000.000	109.891.732	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000	49.481.300	
	Meningkatnya Jumlah Investasi			
	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	648.883.000	644.187.538	99,28
	Program Promosi Penanaman Modal	0	0	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	648.883.000	644.187.538	
	Jumlah	6.835.803.514	5.943.373.372	86,94

Pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2024 relatif berjalan lancar dengan realisasi keuangan mencapai 86,94%.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan guna mewujudkan tujuan yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja
Tahun 2025

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Capaian	Tingkat Capaian
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80%	85,22%	106,53%
	Meningkatnya Jumlah Investasi	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	2.666	2.348	88,08%
Rata- rata capaian kinerja					97,31%

Berdasarkan hasil pengukuran table di atas, tingkat capaian indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes mencapai 106,53% dan Realisasi Invetasi mencapai 80,16%, dengan rata rata capaian kinerja sebesar 97,31%. Berdasarkan capaian skala kinerja pada skala pengukuran kinerja instansi pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes tahun 2024 termasuk pada kategori kinerja BAIK.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam perjanjian kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola Pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Brebes dimasa yang akan datang.

Brebes, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes



Dra. TEDY YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19680710 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. P. Diponegoro Nomor 141 Telp/Fax. (0283) 671026
BREBES - 52212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. TETY YULIANA, M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, S.H, M.Hum

Jabatan : Pj. Bupati Brebes

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES



IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.

Pihak Pertama,
KEPALA DPMPTSP KAB. BREBES



Dra. TETY YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat (%)	80,00
Meningkatnya jumlah investasi	Realisasi investasi (Milyar Rp)	2.666

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	6.247.483.654,-	100% APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,-	100% APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	0,-	100% APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	110.000.000,-	100% APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	648.883.000,-	90% DAK Non Fisik 10% APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000,-	100% APBD
	TOTAL	7.056.336.654,-	

Brebes, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES



IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.

Pihak Pertama,
KEPALA DPMPTSP KAB. BREBES



Dra. TETY YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Telepon (0283) 8420222 Faksimile (0283) 8420111
Laman: dpmptsp.brebeskab.go.id, Pos-el: dpmptspbres@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. TETY YULIANA, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Djoko Gunawan, M.T
Jabatan : Pj. Bupati Brebes
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, September 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T

Pihak Pertama,
KEPALA DPMPTSP KAB. BREBES

Dra. TETY YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat (%)	80,00	80,00
Meningkatnya jumlah investasi	Realisasi investasi (Milyar Rp)	2.666	2.666

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	6.247.483.654,-	6.026.920.514,-	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,-	0,-	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	0,-	0,-	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	110.000.000,-	110.000.000,-	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	648.883.000,-	648.883.000,-	APBD dan DAK NON FISIK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000,-	50.000.000,-	APBD
TOTAL		7.056.366.654,-	6.835.803.514,-	

Brebes, September 2024

Pihak Kedua,
BUPATI BREBES



Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T

Pihak Pertama,
KEPALA DPMPTSP KAB. BREBES



Dra. TETI YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
INSPEKTORAT DAERAH

KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU Lt. 4

Jl. Proklamasi Nomor 77 Brebes 52211

Telepon (0283) 671779 Laman: inspektorat.brebeskab.go.id, Pos-el: inspektorat@brebeskab.go.id

Nomor : 700/54/II/2025
Lampiran : -
Hal : Hasil Reviu LKjIP Tahun 2024

Brebes, 03 Februari 2025

Yth.

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes
Di Brebes**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/0087/II/2025 tanggal 23 Januari 2025, kami telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2024. Pelaksanaan reviu berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa hal yang menjadi catatan adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator kinerja hasil survey kepuasan masyarakat(SKM):

- Indikator kinerja dalam LKjIP menggunakan satuan prosentase(%), sedangkan data hasil pengukuran yang disajikan laporan SKM berupa indeks/skor.
- Belum menyajikan penjelasan ringkas dari laporan SKM, seperti pelaksanaan survey, jumlah responden, maupun hasil pengukurannya.

2. Pada indikator kinerja realisasi investasi:

- Terdapat ketidaksesuaian nilai realisasi investasi berdasarkan LKPM tahun 2024, sebagai berikut:
Tabel 3.5 dan gambar 3.4, senilai Rp2.136.941.044.955
Tabel 3.6 dan gambar 3.5, senilai Rp1.772.812.478.836, dengan penjelasan.
- Terdapat perbedaan capaian realisasi investasi yang signifikan antara capaian realisasi berdasarkan NIB yang terbit senilai Rp4.261.261.704.568 dan berdasarkan LKPM senilai Rp2.136.941.044.955. Serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, capaian realisasi berdasarkan NIB mengalami penurunan namun berdasarkan LKPM mengalami kenaikan, sehingga diperlukan penjelasan perbedaan tersebut.

3. Terdapat penyajian perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD 2017-2022(tabel 3.9), yang seharusnya penyajian perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPD 2023-2026.

4. Pada penyajian perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional/ provinsi, belum dicantumkan informasi sumber data standar tersebut.

5. Pada analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan dan solusi perbaikan yang disajikan:
- Indikator survey kepuasan masyarakat(tabel 3.12), dalam hal kemudahan prosedur, kesesuaian prosedur maupun penanganan pengaduan, solusi perbaikan/ peningkatan dapat dikaitkan dengan Standar Operasional Prosedur(SOP) maupun pelayanan berbasis elektronik.
 - Sesuai yang tercantum hal.29 LKjIP DPMPTSP menghadapi beberapa permasalahan utama seperti belum efektifnya peran tim teknis pelayanan perizinan dan belum optimalnya penyediaan media informasi berbasis teknologi informasi, namun permasalahan tersebut tidak termuat pada analisa penyebab tabel 3.12 maupun tabel 3.13.
6. LKjIP belum disajikan dengan lampiran yang mendukung badan laporan, sebagai berikut:
- a. Perjanjian Kinerja Perubahan;
 - b. Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Dokumentasi penghargaan yang berkaitan pelayanan perizinan tahun 2024.

Demikian laporan hasil reviu LKjIP DPMPTSP tahun 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n Inspektur Daerah Kabupaten Brebes
Inspektur Pembantu Wilayah III



Herbagoes Tri Noeroso, S.E.
NIP. 19680718 199303 1 004

Pengendali Teknis,

Yudha Widaswara, S.E.
NIP. 19810502 200501 1 011